Surat Pernyataan Sikap
Masyarakat Adat dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
Untuk Kebijakan Penegakan Hukum dan Perubahan Tata Kelola Usaha Pengelolaan Lahan dan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Tanah Papua, Kasus Gugatan Pencabutan Izin Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

1. Kami masyarakat adat yang berdiam di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, yang terdampak aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit, bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil.
2. Kami memandang perlunya melakukan perubahan tata kelola usaha pengelolaan lahan dan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua, yang berpihak pada Orang Asli Papua dan lingkungan hidup di Tanah Papua.
3. Kami memandang perlunya kebijakan pemerintahan yang adil dan bersih, transparan dan bertanggung jawab, dan dengan memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Sehubungan dengan kebijakan putusan bupati tentang pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit (2021) dan gugatan perusahaan terhadap putusan bupati Sorong dan Sorong Selatan yang sedang berlangsung.

maka kami menyatakan:

1. Mendukung Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan dalam melakukan upaya hukum atas gugatan perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong ; dan PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia di Kabupaten Sorong Selatan, demi keadilan, perubahan dan pemajuan tata kelola yang menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan untuk membuat putusan yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, serta mempertimbangkan fakta lapangan terkait keberadaan dan hak-hak hidup masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Mendukung segala upaya masyarakat adat membela dan mempertahankan hak atas tanah dan hutan adat yang tersisa, demi hidup generasi saat ini dan generas penerus masa mendatang;

“Tanah Kami Hidup Kami”
“Hutan Adat untuk Hidup Kami”
“Lawan Perampasan Tanah”

Jakarta, 16 November 2022

Kami yang membuat pernyataan:

No.	Nama	Institusi	Tanda Tangan